

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah (Pemda) merupakan lembaga pemerintahan yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat daerah. Pemda memiliki wewenang dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat di wilayahnya. Pemerintah Daerah memiliki hak dan wewenang untuk menggunakan dana daerah sesuai dengan kebutuhan daerah sehingga Pemerintah Daerah harus memaksimalkan sumber pendapatan daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan adanya otonomi daerah Pemerintah Daerah dipacu untuk mencari sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat mendukung pengeluaran daerah. Otonomi daerah memberikan hak kepada daerah untuk menentukan sendiri arah dan tujuan pembangunan di daerahnya. Ini terjadi sebagai konsekuensi penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara penuh untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Pembangunan daerah di nilai mampu apabila daerah sendiri yang menanganinya dengan otonomi, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk mengelola pendapatan asli daerah. Daerah sudah mempunyai kewenangan penuh untuk dapat menggali sumber pendapatan yang potensial

untuk dapat mendukung pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan otonomi daerah dimaksudkan agar daerah dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri, oleh karena itu perlu upaya serius dilakukan oleh daerah kabupaten untuk meningkatkan keuangan daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi Kabupaten Tegal. Salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah juga mengandalkan PAD sebagai salah satu sumber pendapatan penting. Salah satu komponen utama PAD Kabupaten Tegal adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber penerimaan daerah dimana salahsatunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan tercapai jika sumber yang mempengaruhi mengalami peningkatan. Komponen pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Sumber pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten tegal terdiri dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Terhitung dari tahun 2019-2023 realisasi untuk pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tegal setiap Tahunnya meningkat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tegal data penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019-2023.

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi BPHTB	Realisasi PAD
2019	25.137.992.747	438.277.936.166
2020	25.885.601.646	437.357.317.115
2021	35.832.212.694	590.328.406.301
2022	44.512.166.023	531.219.878.834
2023	54.225.601.053	500.200.462.111

Sumber : BAPENDA Kabupaten Tegal, 2024

BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum mengakibatkan di perolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Sedangkan hak atas tanah dan bangunan adalah hak atas tanah, termasuk pengelolaan, beserta bangunan atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertanahan dan bangunan (Yusmita, 2020). Pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran sentral dalam mengelola keuangan daerah dan memaksimalkan pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Salah satu unit pelaksanaan teknis yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Handoko, 2012). Secara umum efektivitas menunjukkan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu telah ditentukan. Oleh karena itu efektivitas dalam penerimaan realisasi harus tercapai sesuai dengan target, karena ketika tercapainya efektivitas tersebut maka tujuan yang di inginkan instansi juga tercapai dengan baik.

Kontribusi adalah sumbangan atau sesuatu kegiatan yang diberikan terhadap suatu kegiatan sehingga memberikan dampak yang bisa dirasakan (Absor, 2017). Apabila pemerintah lebih mengoptimalkan potensi dari pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) maka kontribusi dalam pendapatan asli daerah (PAD) menjadi meningkat. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana BPHTB memberikan sumbangan dalam Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah, begitu pula sebaliknya apabila hasil perbandingannya terlalu kecil maka peranan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah juga kecil (Mahmudi, 2011).

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi sumberdaya tanah dan bangunan yang cukup besar dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah aktivitas peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan di iringi dengan peningkatan pemungutan pajak daerah khususnya untuk BPHTB sepenuhnya yang diserahkan kepada Badan

Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tegal. Salah satu permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah penerimaan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kontribusi dari BPHTB Kabupaten Tegal. dilihat dari tabel 1.1 pajak BPHTB mengalami peningkatan disetiap tahunnya akan tetapi PAD mengalami penurunan disetiap tahunnya.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal**".

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektifitas penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Tegal ?
2. Bagaimana kontribusi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tegal ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Mengetahui tingkat efektifitas Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Tegal.

2. Mengetahui kontribusi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tegal.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun pihak luar. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi peneliti

Sebagai persyaratan untuk menempuh Diploma III Akuntansi dan memperdalam teori yang diperoleh di politeknik harapan bersama serta menambah pemahaman dan pengetahuan tentang pajak daerah khususnya BPHTB.

2. Bagi Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA)

Dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber bagi seluruh karyawan BAPENDA untuk meningkatkan pemahaman di bidang informasi pajak tentang informasi perpajakan BPHTB (Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) BPHTB.

3. Bagi Politeknik Harapan Bersama

Sebagai bahan referensi yang dapat memberikan informasi penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan yang dihadapi dan sebagai informasi tambahan di perpustakaan untuk peneliti selanjutnya.

1.5. Batasan Masalah

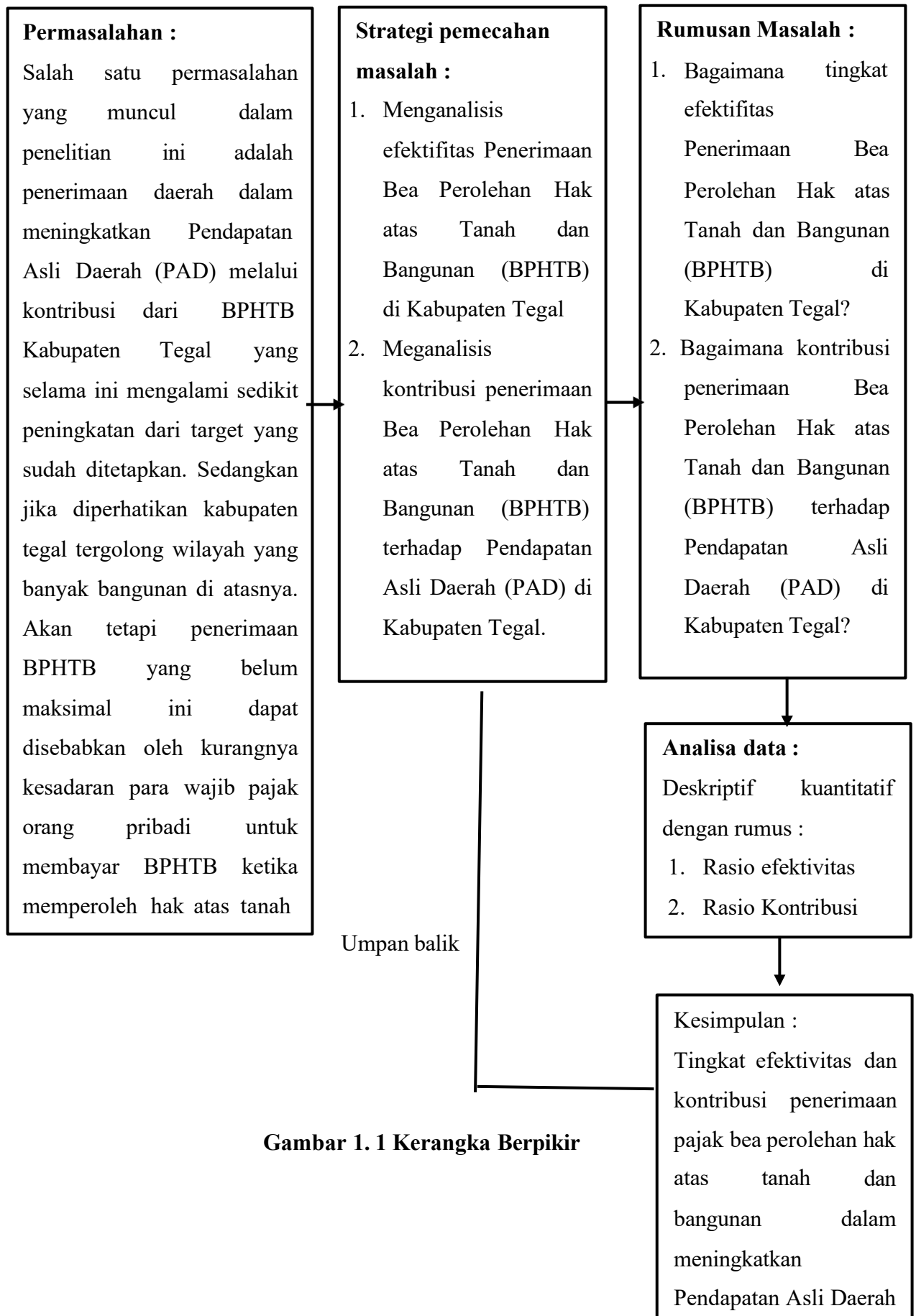
Adapun permasalahan yang menjadi batasan masalah dalam penyusunan penelitian ini bertujuan agar pembahasan penelitian ini lebih

terarah dari batasan masalah yang akan dibahas. Penelitian ini hanya membahas salah satu pajak daerah yang berada di Kabupaten Tegal yaitu pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Tegal tahun 2019-2023 dengan menggunakan rasio efektivitas dan kontribusi.

1.6. Kerangka Berpikir

Sebuah penelitian dibutuhkan kerangka berpikir untuk memudahkan dalam penelitian. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi Kabupaten Tegal. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan tercapai jika sumber yang mempengaruhi mengalami peningkatan. Sehingga BPHTB diperlukan untuk memastikan kontribusi penerimaan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tegal secara optimal sehingga wajib pajak itu sendiri berperan aktif untuk melaporkan, menghitung dan membayar pajak BPHTB yang terhutang.

Untuk tercapainya efektivitas tersebut maka tujuan yang di inginkan instansi juga tercapai dengan baik. Rasio Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana BPHTB memberi sumbangan dalam Pendapatan Asli Daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dilakukan penyederhanaan menggunakan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan tugas akhir ini penulis membuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian awal

Bagian awal berisi sampul dan judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian tugas akhir, halaman lembar pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah demi kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan lampiran.

2. Bagian isi

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan penulis dalam penelitian seperti menjelaskan tentang analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas

Tanah Dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, jenis data, sumber data dan metode pengumpulan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan uraian gambaran umum objek penelitian. Memberikan gambaran secara singkat seperti profil singkat perusahaan. Pada hasil implementasi data memuat laporan hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan garis besar kesimpulan yang diambil dari inti penelitian dan hasil penelitian. Pada saran berisi Tindakan yang perlu diambil untuk ditinjau lanjut yang lebih baik dari hasil pemecahan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisikan semua pustaka yang dipakai penulis dalam mengerjakan tugas akhir baik itu berbentuk buku, majalah, website, jurnal, artikel, dan literatur lainnya.

3. Bagian akhir

Bagian akhir berisi lampiran-lampiran yang memuat informasi tambahan untuk mendukung kelengkapan laporan penelitian penulis.

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan.